



# BPK RI Serahkan Hasil Pantauan

## KKR Peringkat Pertama

Andika Lay  
Borneo Tribune, Pontianak

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar, Jumat (20/1) menyerahkan hasil pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada seluruh Ketua DPRD dan kepala daerah di wilayah Kalbar, di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar.

Penyerahan ini sebagai wujud apresiasi

....Ke Halaman -11

## BPK RI Serahkan Hasil Pantauan

dan pemacu atas keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan tindak lanjut sampai dengan semester II tahun 2011, dan BPK RI Perwakilan Kalbar telah menilai dan menyampaikan peringkat pemda yang didasarkan pada tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK RI.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, Peringkat 1 Kabupaten Kubu Raya dengan skor 60 poin, dan naik 1 poin, sementara, peringkat 2, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan skor 53, dan turun 4 poin, peringkat ke 3, Kabupaten Sintang, dengan skor 44 dan naik 10 poin, Kabupaten Sambas juga menduduki peringkat 3 dengan skor 42, dan turun 15 poin, peringkat 4 Kabupaten Sanggau dengan skor 37 dan naik 10 poin, peringkat 5, Kabupaten Landak dengan skor 34 dan turun 10 poin, peringkat 6 Kota Pontianak dengan skor 32 dan naik 3 poin, begitu juga dengan Kabupaten Kayong Utara yang juga berada di peringkat 6 dengan skor 29 dan turun 8 poin.

Peringkat 7, Kabupaten Bengkayang dengan skor 28 dan turun 15 poin, begitu juga dengan Kota Singkawang yang juga berada peringkat yang sama memperoleh skor 27 dan turun 7 poin. Peringkat 8, Kabupaten Sekadau de-

ngan skor 24 dan turun 18 poin, begitu juga dengan Kabupaten Pontianak yang berada pada posisi sama memperoleh skor 23, dan turun 10 poin, dan Kabupaten Ketapang, dengan skor 23 dan naik 1 poin.

Peringkat 9, Pemerintah Provinsi Kalbar dengan skor 12 dan turun 10 poin, begitu juga dengan Kabupaten Melawi yang berada di urutan buncit bersama Pemprov Kalbar memperoleh skor 12 dan turun 2 poin. Peringkat 10-15 nihil.

"Seluruh hasil pemeriksaan kinerja atas BP2T Kota Pontianak, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), atas PAD Kota Pontianak, dan Kota Singkawang, serta PDTT atas belanja infrastruktur pada Provinsi Kalbar, Landak, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Ketapang," kata Adi Sudibyo, usai menyerahkan hasil TLHP dan LHP, di Aula BPK RI.

Dikatakan olehnya, dalam hasil pemeriksaan belanja infrastruktur, BPK RI secara khusus memberikan perhatian dan catatan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan hutan dengan tidak mendahului izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

"Analisa dampak lingkungan juga tidak dilaksanakan dengan baik, dan saya mengi-

ngatkan kepada DPRD dan para kepala daerah untuk tetap mengikuti peraturan yang ada, mengingat, konsekuensi yang berat dari peraturan dan menyangkut pidana bidang kehutanan," ingatnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya atas TLHP ini dapat tergambar perkembangan capaian penyelesaian tindak lanjut hingga semester ini, dan hal penting sebagai langkah awal dari komitmen bersama untuk terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang tertib dan taat ketentuan yang berlaku.

"Untuk di provinsi, saya telah meminta kepada jajaran Kepala SKPD agar tidak main-main dalam urusan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI," kata Christiandy Sanjaya.

Dijelaskan olehnya, beban dan tanggung jawab Tim Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Tim TPKD yang dibentuk eksekutif ini sangat berat, dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar para pimpinan SKPD, untuk sesegera mungkin menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, baik itu terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penyelesaian kerugian daerah. □